

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Provinsi Jawa Tengah

Halaman 2

Kabupaten/Kota Diinstruksikan Kebut Administrasi

Pencairan Bantuan Keuangan dari Pemprov

SEMARANG - Pemerintah kabupaten/kota diminta segera mengidentifikasi kegiatan yang diprediksi tak bisa dilaksanakan dari alokasi bantuan keuangan (bankeu) APBD Provinsi 2017.

Perintah itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng Sri Puryono pada 11 Agustus. Hal itu menjadi salah satu dari tiga poin utama dalam surat edaran.

Dua hal lain adalah perintah pada pemerintah kabupaten/kota untuk

mempercepat proses administrasi dan segera memproses pengadaan barang dan jasa melalui undang-undang yang berlaku.

Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah Tavip Supriyanto menjelaskan, total anggaran bankeu untuk kabupaten/kota pada 2017 sebesar Rp 1,532 triliun. Rinciannya, Rp 1,478 triliun untuk sarana prasarana atau sarpras (563 kegiatan), Rp 29,47 miliar untuk pendidikan (17 kegiatan), dan Rp 24,338 miliar untuk selain sarana prasarana dan pendidikan (239 kegiatan).

"Per triwulan kedua, realisasi fisik sarpras baru 6,55%. Sebagian

besar kegiatan masih dalam tahap lelang. Saat ini mungkin sudah ada progres. Pemprov sudah dua kali mengumpulkan kabupaten/kota untuk berkoordinasi. Jika ada kendala, segera sampaikan. Sudah dikeluarkan SE untuk percepatan realisasi bankeu," kata Tavip, kemarin.

Masih Nol Persen

Untuk realisasi fisik, tertinggi di Kota Tegal 67,36%. Disusul Kabupaten Tegal 25,73%, Kota Solo 23,86% dan Kota Pekalongan 22,32%. Capaian terendah Kabupaten Karanganyar 0,02%, Sukoharjo 0,11%, Kudus 0,53%, Demak 0,62%, dan Klaten 0,63%.

Sementara itu realisasi kegiatan pendidikan masih 0%. Bantuan keuangan bidang pendidikan hanya untuk enam kabupaten yaitu Boyolali, Brebes, Karanganyar, Purbalingga, Wonogiri, dan Wonosobo.

Adapun realisasi bankeu selain sarpras dan pendidikan sudah 41%. Realisasi pencairan bidang sarpras baru 1,04%.

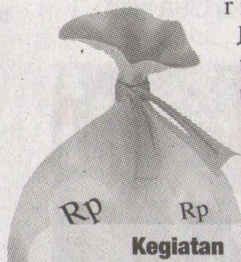
Bidang pendidikan 0%, sedangkan selain sarpras dan pendidikan 50,24%.

Seperti diberitakan, Pemprov mengalokasikan anggaran bankeu untuk 35 kabupaten/kota tahun 2017 sebesar Rp 2 triliun. Namun, hingga semester pertama 2017, serapan anggaran baru Rp 27 miliar (1,35%).

Jumlah itu hampir setengah dana Pemprov yang masih mengendap di rekening kas daerah. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melansir, dana simpanan pemerintah daerah Jateng akhir Juni 2017 adalah Rp 4,81 triliun.

Tahun ini, bankeu tertinggi diperoleh Wonogiri Rp 94,5 miliar. Urutan berikutnya Banjarnegara Rp 81,4 miliar, Brebes Rp 75,4 miliar, Sragen Rp 75,2 miliar, dan Grobogan Rp 71,4 miliar. Terendah Kota Magelang Rp 10,4 miliar, Salatiga Rp 11,1 miliar, Kota Tegal Rp 19,6 miliar.

Ada tiga daerah dengan realisasi serapan anggaran nol persen, yaitu Wonosobo, Karanganyar, dan Wonogiri. (H81-18)



Alokasi Bankeu 2017

Kegiatan	Nominal	Pencairan
Sarana-prasarana	Rp 1,478 triliun	1,04%
Pendidikan	Rp 29,47 miliar	0%
Nonsarana-prasarana/pendidikan	Rp 29,33 miliar	50,24%

♦ Catatan: Data per triwulan kedua 2017

Sumber: Biro Bangda Pemprov Jateng. (H81-18)